

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK JALANAN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

## Saiful Anwar

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
saifulanwar@iainsasbabel.ac.id

## Musa

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
musa@iainsasbabel.ac.id

## Iqrom Faldiansyah

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
iqromulyaizza@gmail.com

## Ichsan Habibi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
Ichsanhabibi760@gmail.com

### **Abstract:**

*The phenomenon of street children who often dress up as punks has begun to color the scenery in several district capitals in Bangka Belitung Province. Their activities have also begun to disturb the community and disturb public order. This study examines the government's response and its efforts to overcome the phenomenon of street children. The research method uses a qualitative approach, data collection is done by observation, interviews and documentation. The results show that most of the street children who are active on the streets of the cities in Bangka Belitung Province come from outside the Bangka Belitung. The government has made various efforts to overcome this problem, but the results have not been maximized. This research concludes that the government's response to street children is still preventive.*

**Keywords:** *Street children, disturb public order, goverment's response*

### **Abstrak:**

*Fenomena adanya aktivitas anak jalanan yang kerap berdandan layaknya anak punk mulai mewarnai pemandangan di beberapa ibu kota kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Aktivitas mereka pun sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini mengkaji respon pemerintah dan upayanya mengatasi fenomena anak jalanan tersebut. Metode peneltian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian*

*ini menemukan bahwa anak jalanan yang beraktivitas di jalanan wilayah kota-kota di Provinsi Bangka Belitung sebagian besar di antaranya berasal dari luar Bangka Belitung. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, namun hasilnya belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan respon pemerintah terhadap anak jalanan masih bersifat preventif.*

**Kata kunci:** *Anak jalanan, Gangguan ketertiban umum, Respon pemerintah*

Received: 23-06-2024; Accepted: 13-07-2024; Published: 14-07-2024

## A. Pendahuluan

Anak jalanan merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan memiliki pandangan atau stigma negatif. Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya beraktivitas di jalanan seperti mengamen, dagang asongan dan aktivitas lainnya. Stigma tersebut tidak sepenuhnya benar namun juga tidak sepenuhnya salah. Sebab menjadi anak jalanan bukan sebuah pilihan, apalagi pilihan yang menyenangkan. Namun di sisi lain anak jalanan yang kemudian terjaring razia, banyak di antaranya adalah para pelaku kriminalitas berbanding lurus dengan perilaku hidupnya yang menyimpang seperti seks bebas, narkoba, mabuk-mabukan dan perilaku negatif lainnya.

Anak jalanan tak hanya beredar di kota-kota besar bahkan di Kota Pangkalpinang yang notabene adalah kota kecil, jumlahnya tidak sedikit. Fifie Anggia<sup>1</sup> menemukan bahwa jumlah anak jalanan di Kota Pangkalpinang lebih dari 100 orang. Mereka mudah dijumpai sebab biasanya mereka ngamen di perempatan lampu merah Ramayana. Menurut temuan penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa anak-anak jalanan di Pangkalpinang yang biasanya ngamen tersebut, juga mabuk-mabukan hingga tidak sedikit yang kedapatan melakukan tindak kriminal. Bukan sesuatu yang mengherankan jika dilihat dari gaya hidup mereka yang seolah tidak peduli dengan masa depan, tanpa arah, jauh dari kata ibadah, arogan dan merasa paling benar, tidak peduli terhadap orang lain dan anti terhadap nilai-nilai religius.

---

<sup>1</sup> *Wawancara*, 7 Agustus 2023. Fifie pernah melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi S1 nya di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Hal serupa juga yang terjadi pada anak jalanan yang beredar di Kota Sungailiat. Menurut Pak Toriq,<sup>2</sup> ia mengemukakan bahwa jumlah anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan Kota Sungailiat saat ini berkisar 20-an orang. Menurutnya, sebagian besar dari anak jalanan tersebut merupakan anak yang lari dari rumahnya karena merasa tertekan dan kehilangan kehangatan keluarga di rumahnya. Meneruskan informasi dari anak-anak jalanan yang pernah ia tampung, menyebutkan bahwa sebagian di antara anak jalanan tersebut sudah ada yang tergabung dan dibina oleh sebuah komunitas. Namun informasi tersebut terbantahkan oleh Sepriyandi,<sup>3</sup> Kasie Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang menyebutkan bahwa sejauh sepengetahuannya hingga saat ini, Dinsos Kota Pangkalpinang tidak memiliki data maupun informasi adanya pihak yang membina anak-anak jalanan tersebut, baik yang bersifat kelembagaan maupun yang sifanya personal, demikian juga di wilayah-wilayah yang lain.

Terkait dengan aktivitas anak jalanan yang dianggap meresahkan masyarakat, di Kota Pangkalpinang pernah dilakukan pembubaran *rendesvous* atau tongkrongan anak-anak jalanan.<sup>4</sup> Di Sungailiat diberitakan bahwa Satpol PP mengamankan 5 orang anak jalanan yang kedapatan sedang mengamen di kawasan lampu merah, di rumah makan Padang dan di kawasan taman kota.<sup>5</sup> Bahkan, di antara mereka ada satu orang Wanita yang kedapatan sedang hamil. Begitu juga di Bangka Barat, anak-anak jalanan sudah meresahkan sehingga diamankan juga oleh Satpol PP.<sup>6</sup>

Fakta sosial tersebut menegaskan bahwa keberadaan anak-anak jalanan sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat, belum lagi keberadaan mereka yang justru memicu keresahan. Mengeluhkan keberadaan mereka dan penindakan pengamanan terhadap komunitas anak jalanan ini, tentu saja tidak menyelesaikan persoalan. Langkah bijak yang

---

<sup>2</sup> Wawancara, 21 Juli 2023. Pak Toriq mengaku pernah menampung anak-anak jalanan yang beredar di Kota Sungailiat dan membina mereka dengan menyertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hanya bertahan lebih kurang satu bulan hingga anak-anak jalanan tersebut pergi satu persatu.

<sup>3</sup> Sepriyadi, Kasie Rehsos Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Wawancara, 14 Agustus 2023

<sup>4</sup> 'Bikin Resah, Polsek Bukit Intan Bubarkan Tongkrongan 10 Anak Punk Yang Sedang Mabuk - Bangkapos.Com' <<https://bangka.tribunnews.com/2023/02/02/bikin-resah-polsek-bukit-intan-bubarkan-tongkrongan-10-anak-punk-yang-sedang-mabuk>>.

<sup>5</sup> 'Satpol Bangka Amankan 5 Anak Punk, Satu Wanita Hamil Muda', *Bangkapos.com* <<https://bangka.tribunnews.com/2023/02/17/satpol-bangka-amankan-5-anak-punk-satu-wanita-hamil-muda>>.

<sup>6</sup> Rizki Ramadhani, 'Meresahkan, 9 Anak Punk di Bangka Barat Ditangkap Satpol PP', *iNews.ID*, 2022 <<https://babel.inews.id/berita/meresahkan-9-anak-punk-di-bangka-barat-ditangkap-satpol-pp>>.

bisa dilakukan untuk memutus generasi anak jalanan salah satunya adalah dengan memberdayakan mereka. Merangkul dan melibatkan mereka dalam agenda-agenda kegiatan positif untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat sehingga dapat menjalani hidup sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya.

Realitas sosial berupa anak jalanan yang beredar di wilayah perkotaan di Indonesia tak bisa dipungkiri kenyataannya. Meski Indonesia merupakan negara kaya, memiliki sumber daya alam yang melimpah namun tidak serta merta menjadikan rakyatnya sejahtera. Pengetahuan dan manajemen, maupun teknologi untuk mengelola sumber daya tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang terbatas. Karenanya, Aldi Prasetyo, dkk.<sup>7</sup> menyebutkan bahwa salah satu faktor besar yang mendorong hadirnya anank-anak jalanan di Indonesia adalah karena faktor kemiskinan. Faktor lain yang turut menyumbang adalah karena hilangnya kehangatan komunikasi keluarga karena kesibukan orang tua maupun karena *broken home* atau perceraian.<sup>8</sup>

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menangani masalah anak jalanan sebagaimana amanat dari PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.<sup>9</sup> Meski kasus anak jalanan khususnya di Bangka bersifat insidental, namun perlu mendapatkan perhatian serius, sejurus dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki pulau Bangka. Adapun yang dimaksud pemerintah dalam penelitian adalah Dinas Sosial serta dinas terkait yang berhubungan langsung dengan Dinas Sosial terkait dengan anak jalanan, terutama adalah Satpol PP.

## B. Diskusi

Beberapa penelitian pernah dilakukan terkait dengan masalah anak jalanan ini. Di antaranya dilakukan oleh Dede Fatimah, dkk.<sup>10</sup> Penelitian ini mengevaluasi peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi, secara khusus menyoroti upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Undang-

---

<sup>7</sup> Aldi Prasetyo Amiru dkk, *INDONESIA & MITOS NEGERI MACAN ASIA* (Alinea Media Dipantara), h. 61.

<sup>8</sup> dkk, h. 61.

<sup>9</sup> 'PP Nomor 78 Tahun 2021.Pdf'. <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>10</sup> Dede Fatimah, Febri Handayani, dan Hellen Last Fitriani, 'PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK JALANAN YANG DI EKPLOITASI SECARA EKONOMI', *Journal of Sharia and Law*, 2.2 (2023), hal. 516–35.

undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun tentang Perlindungan anak, serta menggali faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan anak jalanan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya dibidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam menangani Anak Jalanan yang dieksploitasi secara Ekonomi di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum maksimal. Kurang maksimalnya penanganan tersebut di antaranya karene beberapa faktor; kurangnya komunikasi pemerintah terhadap para orang tua anak jalanan ataupun masyarakat, belum tersedianya fasilitas untuk pembinaan anak jalanan, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), masa rehabilitasi yang diberlakukan hanya 7 hari, serta alokasi anggaran untuk sumber pendanaan penanganan masalah anak jalanan yang minim.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Decky Irianti dan Teta Riasih.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh dan empiris tentang dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan di Kota Pontianak dan menemukan bahwa program penanganan anak jalanan belum terkoordinasi dengan baik dan tidak didukung oleh keberadaan pekerja sosial profesional yang memadai.

Selanjutnya penelitian M. Ramadhani, dkk yang dilakukan di Kota Banjarmasin.<sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam penanggulangan anak jalanan bekerjasama dengan pihak Satpol PP. Mengawasi peningkatan jumlahnya dan mengawasi tempat yang biasanya dijadikan titik kumpul, bekerjasama dengan pihak lain yang bergerak di bidang pembinaan anak jalanan di Bantu Apus Jakarta Timur-SDC (Social Development Centre). Bentuk program berupa pembinaan kepribadian sikap, mental dan pelatihan. Salah satu kendala besar dalam penanganan anak jalanan ini adalah belum terbangunnya kesadaran masyarakat tentang bentuk lain dari 'peduli' anak jalanan.

---

<sup>11</sup> Decky Irianti and Teta Riasih, 'DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT', *Sosiohumaniora*, 17.1 (2015), hal. 13-20, doi:10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5667.

<sup>12</sup> M. Ramadhani and Sarbaini Harpani Matnuh, 'PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA BANJARMASIN', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016), hal. 947-954, doi:10.20527/kewarganegaraan.v6i11.744.

Karenanya Dinsos Banjarmasin tak henti mengimbau kepada warga agar tidak memberi barang atau uang kepada anak-anak yang beredar di jalanan.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif . Pendekatan kualitatif ini dilakukan agar peneliti dapat lebih dalam memahami makna dibalik fakta atau data yang tampak, terutama yang terakit dengan fokus masalah pada penelitian ini, makna-makna yang masih kabur atau tersirat terkait denagn respon pemerintah terhadap anak jalanan dapat diungkapkan dengan lebih jelas. Data yang diperoleh juga lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran penelitian tentang respon pemerintah terhadap anak jalanan di Bangka dapat tergali secara luas, menyeluruh, holistik (utuh) dan mendalam.

#### 2. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di dua kabupaten dan satu kota. Yakni Kabupaten Bangka Barat dan Bangka, serta Kota Pangkalpinang. Kabupaten Bangka Barat dipilih karena wilayah tersebut adalah jalan masuk bagi warga luar Bangka yang akan ke Bangka mengingat ada dua pelabuhan besar di sana, Pelabuhan Tanjung Kelian dan Pelabuhan Tanjung Muntok. Pelabuhan tersebut merupakan jalan masuk paling memungkinkan untuk anak-anak jalanan yang beredar di luar Pulau Bangka menuju Bangka. Kabupaten Bangka dengan Kota Sungailiat sebagai ibu kotanya merupakan kota besar kedua setelah Kota Pangkalpinang sehingga kemungkinan untuk anak-anak jalanan melakukan kegiatan ekonomi di jalanan kota Sungailiat sangat besar. Kota Pangkalpinang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memang kota paling ramai. Selin itu, Pangkalpinang adalah ibu kota yang merupakan representasi wajah dari kota-kota lain di Bangka Belitung.

#### 3. Nara Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Nara sumber data pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Satpol PP, khususnya adalah petugas pada Bidang

Rehabilitasi Sosisal (Rehsos) dan pejabat dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan pertimbangan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan tangan pemerintah yang didesain untuk menangani masalah-masalah sosial seperti anak jalanan. Pertimbangan berikutnya adalah orang-orang yang ditempatkan pada dinas inilah orang yang dianggap lebih paham tentang masalah yang menjadi fokus penelitian sehingga membantu peneliti untuk dapat lebih jauh dan dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **D. Hasil Pembahasan**

### **1. Program Pemerintah**

Fenomena maraknya anak jalanan yang beroperasi di wilayah-wilayah Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kategori mengganggu ketertiban umum. Karena tidak jarang anak-anak jalanan tersebut sengaja mengamen di perempatan jalan, di depan warung-warung dan toko-toko. Tidak hanya itu, mereka juga mengemis di pinggir jalan raya dengan menengadahkan kotak berharap pengguna jalan memberikan uang. Belajar dari kota-kota besar lain di Indonesia, pemerintah Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<sup>13</sup> Perda Tibum yang disusun DPRD dengan persetujuan Gubernur bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat.

Berkaitan dengan anak jalanan, terdapat kaidah dan larangan yang tertuang dalam Pasal 52 ayat 1. Antaralain larangan kepada masyarakat meminta bantuan atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, tempat umum, dan tempat sosial lainnya.

---

<sup>13</sup> 'PERDA No. 17 Tahun 2016.Pdf'.

Bahkan sebelum Perda nomor 17 di atas diterbitkan, Pemerintah Kota Pangkalpinang secara spesifik telah menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.<sup>14</sup> Perda ini menetapkan beberapa larangan spesifik, antara lain melarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain untuk melakukan pergelandangan dan pengemis. Melarang anak-anak untuk meminta-minta di jalan-jalan umum atau tempat umum lainnya tanpa pengawasan orang tua atau keluarga, terutama pada jam sekolah. Melarang setiap orang atau lembaga memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Tidak main-main, dalam perda tersebut juga secara tegas menyatakan sanksi termasuk pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 bagi pelanggarnya.

Berkaitan dengan implemantasi beberapa Perda di atas, Dinas Sosial dan Satpol PP menjadi garda terdepan untuk pelaksanaannya di lapangan.

## 2. Pelaksanan program dan Hambatan

Dyah Yuni Utari,<sup>15</sup> Kabid Rehsos Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung mengungkapkan, bahwa pelaksana teknis di lapangan terkait masalah anak jalanan adalah Dinas Sosial yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Pihak provinsi lebih kepada upaya pengawasan dan manajerial, mengelola dinas-dinas di setiap kabupaten untuk tetap melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan anak jalanan, Dyah mengungkapkan bahwa anak jalanan yang sering membuat masyarakat tidak nyaman salah satunya merupakan produk dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan oleh orang tuanya sendiri. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa ada banyak motif orang dewasa dalam melakukan eksploitasi terhadap anak ini. Di antaranya adalah diajak berdagang, diajak mengamen dan lainnya.

Apapun motifnya, menurut Dyah, tindakan tersebut adalah tindakan eksploitasi anak. Orang tua membawa serta anak-anak dalam kegiatan perekonomian

---

<sup>14</sup> 'PERDA Pangkal No. 7 Tahun 2015\_Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan.Pdf'.

<sup>15</sup> Dyah Yuni Utari, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Propinsi Bangka Belitung, Wawancara, 14 Agustus

yang tujuannya adalah agar muncul iba, kasihan dari orang lain karena mereka melihat anak kecil. Anak-anak yang kemudian berkeliaran di jalanan tersebut itu embrionya dari anak-anak yang dieksploitasi di jalanan itu.

Sejauh ini, pihak Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penanganan masalah yang terkait dengan ketertiban umum termasuk kegiatan anak-anak jalanan yang beraktivitas di beberapa kota di Bangka Belitung. Dinas Sosial berperan dalam upaya rehabilitasi sementara Satpol PP sebagai penindak keamanan di lapangan.

Sepriyadi, Kasie Rehsos Dinas Sosial Kota Pangkalpinang<sup>16</sup> mengungkapkan dalam penanganan masalah anak jalanan pihaknya berkoordinasi dengan Satpol PP. Dinsos dalam hal ini menerima anak-anak jalanan yang terjaring razia Satpol PP untuk kemudian dilakukan observasi singkat. Tetapi pihak Dinsos belum dapat memberikan layanan rehabilitasi karena belum tersedianya rumah singgah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan observasi mendalam terkait dengan permasalahan masing-masing anak jalanan yang terjaring razia. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah kabupaten-kabupaten lain. Rumah singgah yang menjadi bagian dari Dinas Sosial juga baru dimaksimalkan untuk penanganan ODGJ.

Seturut dengan itu Rosmawati,<sup>17</sup> Kabid Rehsos Dinsos Kabupaten Bangka mengungkapkan bahwa anak-anak yang terjaring razia oleh Sastpol PP kemudian dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Karena sebagian besar mereka adalah anak-anak jalanan yang berasal dari luar Pulau Bangka, maka pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak Dinsos Bangka Barat untuk pemulangan anak-anak jalanan ini. Tetapi program pemulangan ini juga tidak serta merta dapat langsung dilakukan karena terbatasnya biaya yang dimiliki pemerintah.

Pihak Dinsos Bangka Barat dan Satpol PP Bangka Barat juga telah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Syahbandar yang beroperasi di Pelabuhan Mentok untuk lebih ketat dalam pengawasannya sehingga meminimalkan masuknya rombongan anak-anak jalanan masuk ke wilayah Bangka Belitung.

---

<sup>16</sup> Sepriyadi, Kasie Rehsos Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Wawancara, 14 Agustus 2023

<sup>17</sup> Rosmawati, Kabid Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Wawancara, 23 Agustus 2023

Kasus anak-anak jalanan di Bangka Belitung terhitung sangat minim, menurut Dyah<sup>18</sup> kasusnya hanya insidensial. Masuknya anak-anak jalanan tersebut menurut Mashun,<sup>19</sup> mereka biasanya nimbrung atau nebeng dengan kegiatan anak-anak komunitas vespa sehingga masyarakat secara umum memandang mereka adalah bagian dari kegiatan tersebut.

Karena minimnya kasus-kasus terkait anak jalanan ini, maka urgensi untuk mendirikan lembaga yang konsen terhadap permasalahan anak jalanan ini dirasa belum mendesak. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa munculnya anak-anak jalanan selalu berkaitan dengan kegiatan komunitas vespa, maka keberadaan anak-anak jalanan khususnya di Pulau Bangka juga timbul tenggelam. Tidak hanya itu, selama mereka tinggal juga tidak pernah menetap di satu tempat. Baik tempat tinggal maupun tempat berkumpulnya. Artinya, keberadaannya sulit terdeteksi sehingga kerap kali kegiatan razia yang rutin dilakukan Satpol PP juga tidak menemukan aktivitas mereka.<sup>20</sup>

Mashun juga mengatakan bahwa sikap masyarakat Bangka Belitung yang cepat merasa iba atau kasihan dan kebiasaan bersedekah turut serta mempengaruhi keberadaan anak-anak jalanan. Meskipun mereka telang dipulangkan, mereka akan kembali lagi karena budaya sedekah masyarakat Bangka yang masih kental. Bahwa ada Perda yang melarang memberi kepada gelandangan dan pengemis tentu tidak dihiraukan.

Pemerintah dalam hal ini memang menjadi penanggungjawab utama, namun semua upaya meminimalisir permasalahan anak jalanan ini tidak akan berjalan efektif jika tidak ada komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, dinas terkait, dan masyarakat.



*Dokumentasi wawancara dengan Dyah Yuni Utari, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos  
Propinsi Bangka Belitung*



*Dokumentasi wawancara dengan Mashun, Sekretaris Satpol PP Kab. Bangka*

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian respon pemerintah terhadap masalah anak-anak jalanan sejauh ini masih bersifat preventif dengan menerbitkan Peraturan dan Perundang-undangan dan mengembalikan anak-anak jalanan ke tempat tinggalnya masing-masing. Semininim apapun, aktivitas anak-anak jalanan tentu berdampak negatif terhadap upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Bangka Belitung. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak. Meski kepentingannya belum mendesak, sebaiknya sudah ada rancangan untuk program rumah singgah atau panti asuhan yang pada

gilirannya dapat menjadi solusi untuk memberikan tempat yang layak bagi anak-anak jalanan.

Sebagaimana diterbitkannya Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan merupakan langkah penting dalam menangani masalah sosial. Meskipun sudah ada upaya implementasi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, dinas terkait, dan masyarakat.

Mengingat keterbatasan anggaran di pemerintah, maka kepedulian dari pihak lain seperti lembaga-lembaga swasta sangat dibutuhkan terkait dengan penanganan masalah anak jalanan ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan layak bagi anak-anak, tidak hanya di Kota Pangkalpinang namun juga di seluruh wilayah Bangka Belitung.

## DAFTAR PUSTAKA

'Bikin Resah, Polsek Bukit Intan Bubarkan Tongkrongan 10 Anak Punk Yang Sedang Mabuk - Bangkapos.Com' <<https://bangka.tribunnews.com/2023/02/02/bikin-resah-polsek-bukit-intan-bubarkan-tongkrongan-10-anak-punk-yang-sedang-mabuk>> [accessed 23 June 2024]

dkk, Aldi Prasetyo Amiru, *INDONESIA & MITOS NEGERI MACAN ASIA* (Alinea Media Dipantara)

Fatimah, Dede, Febri Handayani, and Hellen Last Fitriani, 'PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK JALANAN YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI', *Journal of Sharia and Law*, 2.2 (2023), pp. 516–35

Irianti, Decky, and Teta Riasih, 'DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT', *Sosiohumaniora*, 17.1 (2015), pp. 13–20, doi:10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5667

'PERDA No. 17 Tahun 2016.Pdf'

'PERDA Pangkal No. 7 Tahun 2015\_Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak  
Jalanan.Pdf'

'PP Nomor 78 Tahun 2021.Pdf'

Ramadhani, M., and Sarbaini Harpani Matnuh, 'PERAN DINAS SOSIAL DALAM  
PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA BANJARMASIN', *Jurnal Pendidikan  
Kewarganegaraan*, 6.11 (2016), doi:10.20527/kewarganegaraan.v6i11.744

Ramadhani, Rizki, 'Meresahkan, 9 Anak Punk di Bangka Barat Ditangkap Satpol PP',  
*iNews.ID*, 2022 <<https://babel.inews.id/berita/meresahkan-9-anak-punk-di-bangka-barat-ditangkap-satpol-pp>> [accessed 23 June 2024]

'Satpol Bangka Amankan 5 Anak Punk, Satu Wanita Hamil Muda', *Bangkapos.com*  
<<https://bangka.tribunnews.com/2023/02/17/satpol-bangka-amankan-5-anak-punk-satu-wanita-hamil-muda>> [accessed 23 June 2024]